

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Agustina, Shinta, 2016, *Penjelasan Hukum Penafsiran Unsur Melawan Hukum Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, LeIP, Jakarta.

Atmadja, Arifin P. Soeria, 1986, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*. PT. Gramedia, Jakarta.

Ali, Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Arief, Barda Nawawi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakit.

_____, 2015, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*, Semarang, Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Chazawi, Adami, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2018, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok,

_____, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung.

Djaja, Ermansjah, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.

_____, 1986, *Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Gramedia.

_____, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

_____, 1987, *Surat Dakwaan*, P.T. Alumni, Bandung.

Hartanti, Evi, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Harahap, Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Husein, Harun M, 1990, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Ibrahim, Johnny, H., 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Indraguna, Hendry & Hasibuan, Kayaruddin, 2020, *Memahami Tafsir Pasal Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Tras Mediacom.
- Ishaq, H., 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Kansil, CST, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I., 2011, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I., Jakarta.
- Kejaksanaan Agung Republik Indonesia, 1985, *Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan*. Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1990, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Patiro, Yopie Morya Immanuel, 2012, *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, Keni Media, Bandung.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok
- Prodjodikoro, Wirjono, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Purwati, Ani, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Jakad Media Publishing, Surabaya
- Saebani, Beni Ahmad, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Santoso, Topo, Zulfa, Eva Achjani, 2014, *Hukum Pidana Materiil & Formil*, Jakarta, The Asia Foundation.
- Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Bandung, Alumni.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soetomo, 1989, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Tambunan, Tulus, 2011, *Krisis Ekonomi Indonesia Teori dan Empiris*, Jakarta, Penerbit Universitas Trisakti.

Wijayanto & Zachrie, Ridwan, 2009, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prosepek Pemberantasan*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.

Wiyono, R., 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ngunut, Sinar Grafika.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Konflik Sosial (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5315)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Penguasa Militer No. PRT – PM – 06/1957

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5315).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara No 4723).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6236).

3. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST, perihal Pengadilan Tingkat Pertama terhadap JB dalam Kasus Korupsi Bansos Pandemi Covid-19, 23 Agustus 2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 81 K/Kr/1962

4. Internet

Bank Indonesia, 2003, *Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, dan Peran IMF*, <https://www.bmeb-bi.org/index.php/BEMP/article/view/183>, , diakses tanggal 12 Mei 2023.

CNN, “*Kecap Firli Soal Pidana Mati di Kasus Bansos Juliari*”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210729114354-12-673723/kecap-firli-soal-pidana-mati-di-kasus-bansos-juliari>, diakses 28 Februari 2023.

Hidayat, Rofiq, “*Mendorong Pemberatan Hukuman Dugaan Korupsi terhadap Dua Menteri*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mendorong-pemberatan-hukuman-dugaan-korupsi-terhadap-dua-menteri-lt5fdc6a3801687>, diakses 28 Februari 2023.

Hukum Online, *Jerat Pidana Mati Jika Menyalahgunakan Dana Covid-19*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jerat-pidana-mati-jika-menyalahgunakan-dana-covid-19-lt5e9542e1dbae3/>, di akses pada 23 April 2023.

Hukum Online, *Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk-surat-dakwaan/>, diakses pada 8 Mei 2023.

Indonesia Corruption Watch, *“Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Memburuk Pada 2022”*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/01/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-memburuk-pada-2022>, diakses 2 April 2023.

Kompas, *“Mengenal Virus Corona: Sejarah, Jenis, dan Macam Penyakit Yang Disebabkannya”*, <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/16/133122482/mengenal-virus-corona-sejarah-jenis-dan-macam-penyakit-yang?page=all>, diakses 10 Maret 2023.

Damanik, Margith Juita, *Juliari Batubara Tidak Dijerat Pasal Hukuman Mati, Ini Alasan KPK*, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/margith-juita-damanik/juliari-batubara-tidak-dijerat-pasal-hukuman-mati-ini-alasan-kpk?page=all>, diakses pada tanggal 17 Juni 2023.

Mishkin, Frederic S, *Monetary Policy Strategy*, <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/080000969/krisis-moneter-pengertiandandampaknya?page=all#:~:text=Diambil%20dari%20buku%20Monetary%20Policy,tidak%20berfungsi%20sesuai%20dengan%20harapan>, diakses pada tanggal 12 Mei 2023.

Muhid, Hendrik Khoirul, *“Kronologi Korupsi Bansos Juliari Batubara, Nomor 6 Vonis Diringankan karena Dihujat”*, <https://nasional.tempo.co/read/1619783/kronologi-korupsi-bansos-juliari-batubara-nomor-6-vonis-diringankan-karena-dihujat>, diakses 28 Februari 2023

Rahma, Andita, *“Tak Ajukan Banding, KPK Segera Eksekusi Mensos Juliari Batubara”*, <https://nasional.tempo.co/read/1501059/tak-ajukan-banding-kpk-segera-eksekusi-eks-mensos-juliari-batubara>, diakses 28 Februari 2023.

5. Jurnal

- Bagus, Ida, Dewa, I, 2021, Eksistensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Dalam Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Kertha Wicara* Vol. 10 No. 7.
- Hiariej, Eddy O.S, “United Nations Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 1, Februari, 2019.
- Indarti, Shofia Trianing, 2021, Kebijakan Keimigrasian Di Masa Covid-19: Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Immigration Policy During Covid-19: Human Rights Perspective), *Jurnal Ham* 12.
- Marzi A, Letko M, , Munster V, Functional assessment of cell entry and receptor usage for SARS-CoV-2 and other lineage B betacoronaviruses. *Nature Microbiology*: 2020.
- Permana, Tri Cahya Indra, 2018, “Wewenang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Menghitung Keuangan Negara”, *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 1, No. 1, Februari, 2018.
- Santoso, Boy, Setyorini, Erny Herlin, 2023, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Dih: Jurnal Ilmu Hukum Volume 19 Nomor 1*, hlm. 21-22.
- Sina, La, 2008, “Dampak Dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Januari 2008.
- Porayouw, Joshua, 2021, Kajian Yuridis Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen* Vol. X/No. 7/Jun/2021.
- Prakoso, Tamala Sari Martha, “Pemenuhan Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan Unsur Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 pada Putusan Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 238/PID.B/2009/PN.KRAY jo.Nomor 373/PID.B 2010/PT SMG jo Nomor:167K/PID.SUS/2011 di Pengadilan Negeri Karanganyar)”, *Jurnal Recidive*, Vol. 3, No. 1, Januari-April 2014.
- Yuhermansyah, Edi, Fariza, Zaziratul, 2017, Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Legitimasi* Vol. VI No. 1.

X, Zeng, Xu H, Zhong L, Deng J, Peng J, Dan H, 2020, "High expression of ACE2 receptor of 2019-nCoV on the epithelial cells of oral mucosa". *International Journal of Oral Science*.

6. Tugas Akhir

Lubis, Muhammad Danial, 2022, "*Analisis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Pada Masa Pandemi Covid-19 Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pasundan, Bandung.

Yanti, Silvia Dwi, 2021, "*Analisis Putusan Tindak Pidana Korupsi Di Masa Pandemi Covid-19: Rasionalitas Pertanggungjawaban Pidana*", Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang.

Sari, Andesi Putri, 2022, "*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang.

Nike Beauty Lavenia, 2017, "*Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25-PUU/XIV/2016 Tentang Pergeseran Konsep Kerugian Keuangan Negara Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*", Tesis, Program Studi Magister Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.